

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Distribusi Data

4.1.1 Data dan Sampel

Penelitian ini mengambil sampel para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu periode 2014 – 2019 sebanyak 40 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan selama bulan Januari 2017, berhasil dikumpulkan kembali jawaban kuesioner yang diisi lengkap sebanyak 38 kuesioner tersebut. Adapun ikhtisar dan pengembalian kuesioner pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Distribusi Kuesioner	40	100%
2	Kuesioner Tidak Diisi	2	5 %
3	Kuesioner Yang Diolah	38	95%
N Sampel = 38			
Responden Rate = $38/40) \times 100\% = 95\%$			

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Dari 40 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan diisi secara lengkap hanya 38, dan ada 2 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 38 responden tersebut, maka dapat disajikan informasi umum tentang responden yaitu, usia, jenis kelamin, dan lama kerja dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3, dan 4.4, serta tabel 4.5, sebagai berikut.

4.1.2. Deskripsi Responden

Para responden yang melakukan pengisian kuesioner kemudian akan diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama kerja. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian. Tabel berikut Menunjukkan komposisi responden berdasarkan usia.

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	%
25 – 35 tahun	2	5,263
36 – 45 tahun	13	34,210
46 - 55 tahun	15	39,474
> 55 tahun	8	21,053
Jumlah	38	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.2 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari anggota DPRD dengan usia 46 – 55 tahun berjumlah 15 orang atau 39,474 persen, responden lainnya berusia 36 - 45 tahun dengan jumlah 13 orang atau 34,210 persen, dan sisanya responden berusia kurang dari >55 tahun dan berusia 25 - 35 tahun masing-masing 8 orang dan 2 orang atau 21,053 persen dan 5,263 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Pria	28	73,684%
Wanita	10	26,316%
Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.3 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari anggota DPRD berjenis kelamin pria dengan jumlah 26 orang atau 73,684 persen sedangkan wanita berjumlah 10 orang atau 26,316 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
SMA/Sederajat	15	39,47 %

S1	19	50 %
S2	4	10,53 %
Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.4 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari anggota DPRD berpendidikan S1 dengan jumlah 19 orang atau 50 persen, kemudian berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 15 orang atau 39,47 persen. Sedangkan berpendidikan S2 berjumlah 4 orang atau 10,53 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan lama kerja dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja	Jumlah	%
< 5 tahun	17	44,74 %
5 – 10 tahun	21	55,26 %
Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.5 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari anggota DPRD dengan masa kerja 5 – 10 tahun atau sudah dua periode menjadi anggota DPRD berjumlah 21 orang atau 55,26 persen, responden lainnya dengan masa kerja kurang dari 5 tahun dengan jumlah 17 orang atau 44,74 persen.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Dari dua puluh data tersebut dilakukan olah data secara statistik deskriptif dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Personal Background</i>	38	16	25	19.34	2.623
<i>Political Background</i>	38	20	30	24.32	2.722
Akuntabilitas	38	18	27	21.47	2.436

Transparansi	38	13	19	16.45	1.781
Partisipasi Masyarakat	38	15	23	20.18	2.252
Komitmen Organisasi	38	18	25	21.71	1.930
Pengetahuan Anggaran	38	15	22	18.55	2.214
Pemahaman,Peraturan, Prosedur, Kebijakan	38	13	19	15.82	1.753
Pengawasan Keu.Daerah	38	20	29	24.74	2.698
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

dari tabel di atas untuk masing – masing variabel yaitu: untuk variabel *personal background* diketahui total skor jawaban maksimum adalah 25, dan jawaban terendah 10, sedangkan rata-rata jawaban adalah 19,34, untuk variabel *political background* diketahui total skor jawaban maksimum adalah 30 dan jawaban terendah 20, sedangkan rata-rata jawaban adalah 24,32, untuk variabel akuntabilitas diketahui total skor jawaban maksimum adalah 27 dan jawaban terendah 18, sedangkan rata-rata jawaban adalah 21,47, serta untuk variabel transparansi diketahui total skor jawaban maksimum adalah 19, dan jawaban terendah adalah 13 sedangkan rata-rata jawaban adalah 16,45. Selanjutnya untuk variabel partisipasi masyarakat diketahui total skor jawaban maksimum adalah 23 dan jawaban terendah 15, sedangkan rata-rata jawaban adalah 20,18. Kemudian untuk variabel komitmen organisasi diketahui total skor jawaban maksimum adalah 25, dan jawaban terendah adalah 18 sedangkan rata-rata jawaban adalah 21,71. Selanjutnya untuk variabel pengetahuan anggaran diketahui total skor jawaban maksimum adalah 22, dan jawaban terendah adalah 15 sedangkan rata-rata jawaban adalah 18,55. Untuk untuk variabel pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan diketahui total skor jawaban maksimum adalah 19, dan jawaban terendah adalah 13 sedangkan rata-rata jawaban adalah 15,82. Lalu untuk variabel untuk variabel pengawasan keuangan daerah diketahui total skor jawaban maksimum adalah 29, dan jawaban terendah adalah 20 sedangkan rata-rata jawaban adalah 24,74.

4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.2.1 Uji Validitas

Menurut Prayitno (2010:90) uji validitas adalah untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Product Moment Pearson) untuk melakukan pengujian validitas, dengan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Selanjutnya $r \text{ tabel}$ dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data $N = 38$, maka didapat $r \text{ tabel}$ sebesar 0,320. Dan $r \text{ tabel}$ yang didapat tersebut dibandingkan dengan besarnya nilai $r \text{ hitung}$ hasil perhitungan statistik atau $r \text{ hitung}$ yang dapat dilihat pada masing-masing variabel dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas *Personal Background*

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,708	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item2	0,791	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item3	0,647	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item4	0,737	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item5	0,826	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item6	0,674	0,320	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan $r \text{ hitung}$ *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan $r \text{ tabel}$. Dari output yang diperoleh,

6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang *personal background* adalah valid.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas *Political Background*

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,847	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item2	0,534	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item3	0,779	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item4	0,686	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item5	0,712	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item6	0,559	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item7	0,766	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item8	0,639	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 9 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang *political background* adalah valid.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,745	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item2	0,709	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item3	0,412	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item4	0,633	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item5	0,774	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item6	0,677	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item7	0,694	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh,

7 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang akuntabilitas adalah valid.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Transparansi

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,862	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item2	0,678	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item3	0,875	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item4	0,847	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item5	0,720	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari ouput yang diperoleh, 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang transparansi adalah valid.

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,744	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item2	0,485	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item3	0,620	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item4	0,460	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item5	0,722	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid
Item6	0,766	0,320	r Hitung $>$ r Tabel	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari ouput yang diperoleh, 6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang partisipasi masyarakat adalah valid.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,750	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item2	0,556	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item3	0,553	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item4	0,811	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item5	0,705	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item6	0,634	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang komitmen organisasi adalah valid.

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Anggaran

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,753	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item2	0,870	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item3	0,697	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item4	0,639	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item5	0,887	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item6	0,903	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pengetahuan anggaran adalah valid.

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan, Prosedur, Kebijakan

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,764	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid
Item2	0,638	0,320	$r_{Hitung} > r_{Tabel}$	Valid

Item3	0,870	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,867	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,737	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan adalah valid.

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,738	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,706	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,809	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,717	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,782	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item6	0,618	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item7	0,744	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item8	0,554	0,320	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 8 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pengawasan keuangan daerah adalah valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*. Untuk pengujian biasanya batasan tertentu seperti 0,6.

Menurut Sekaran dalam buku Priyatno (2010:97), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel kompensasi, disiplin kerja, dan kinerja dapat dilihat pada output *Reliability Statistics* dari nilai Cronbach's Alpha pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1	<i>Personal Background</i>	0,823	0,60	Reliabel
2	<i>Political Background</i>	0,847	0,60	Reliabel
3	Akuntabilitas	0,787	0,60	Reliabel
4	Transparansi	0,787	0,60	Reliabel
5	Partisipasi Masyarakat	0,703	0,60	Reliabel
6	Komitmen Organisasi	0,757	0,60	Reliabel
7	Pengetahuan Anggaran	0,885	0,60	Reliabel
8	Pemahaman Peraturan, Prosedur, Kebijakan	0,838	0,60	Reliabel
9	Pengawasan Keuangan Daerah	0,859	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

4.2.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh variabel yaitu *personal background* (X_1), *political background* (X_2), akuntabilitas (X_3), transparansi (X_4), partisipasi masyarakat (X_5), komitmen organisasi (X_6), pengetahuan anggaran (X_7) dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan (X_8) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dari hasil olah data dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.17. *Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.054	.932		-1.131	.267
<i>Personal Background</i>	.153	.055	.149	2.796	.009
<i>Political Background</i>	.131	.058	.132	2.249	.032
Akuntabilitas	.193	.100	.174	1.934	.063
Transparansi	.164	.076	.108	2.150	.040
Partisipasi Masyarakat	.016	.058	.013	.272	.788
Komitmen Organisasi	.272	.090	.194	3.001	.005
Pengetahuan Anggaran	.303	.142	.249	2.140	.041
Pemahaman Peraturan, Prosedur, Kebijakan	.062	.106	.040	.581	.566

a. Dependent Variable: Pengawasan Keu.Daerah

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

dari tabel 4.16 diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + et$$

$$Y = -1,054 + 0,153X_1 + 0,131X_2 + 0,193X_3 + 0,164X_4 + 0,016X_5 + 0,272X_6 + 0,303X_7 + 0,062X_8 , \text{ artinya;}$$

- Nilai $a = -1,054$ artinya jika $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ dan X_8 nilainya 0, maka Y (pengawasan keuangan daerah) nilainya adalah $-1,054$. Dengan kata lain jika *personal background, political background, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengetahuan anggaran dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan* bernilai nol, maka Y (pengawasan keuangan daerah) nilainya adalah $-1,054$.
- Koefisien regresi variabel X_1 (*personal background*) sebesar 0,153; artinya jika nilai X_1 (*personal background*) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,153.
- Koefisien regresi variabel X_2 (*political background*) sebesar 0,131; artinya jika nilai X_2 (*political background*) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,131.

- d. Koefisien regresi variabel X_3 (akuntabilitas) sebesar 0,193; artinya jika nilai X_3 (akuntabilitas) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,193.
- e. Koefisien regresi variabel X_4 (transparansi) sebesar 0,164; artinya jika nilai X_4 (transparansi) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,164.
- f. Koefisien regresi variabel X_5 (partisipasi masyarakat) sebesar 0,016; artinya jika nilai X_5 (partisipasi masyarakat) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,016.
- g. Koefisien regresi variabel X_6 (komitmen organisasi) sebesar 0,272; artinya jika nilai X_6 (komitmen organisasi) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,272.
- h. Koefisien regresi variabel X_7 (pengetahuan anggaran) sebesar 0,303; artinya jika nilai X_7 (pengetahuan anggaran) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,303.
- i. Koefisien regresi variabel X_8 (pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan) sebesar 0,062; artinya jika nilai X_8 (pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan) mengalami kenaikan 1 maka Y (pengawasan keuangan daerah) akan mengalami kenaikan sebesar 0,062.

Sedangkan angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* sebagai berikut:

Tabel 4.18. *Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.978	0.400

- a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan, Prosedur, Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Personal Background, Transparansi, Komitmen Organisasi, Political Background, Akuntabilitas, Pengetahuan Anggaran
- b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199	= sangat rendah
0,20 – 0,399	= rendah
0,40 – 0,599	= sedang
0,60 – 0,799	= tinggi
0,80 – 1,000	= sangat tinggi

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,991, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori sangat tinggi antara *personal background*, *political background*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengetahuan anggaran dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,983 atau 98,3% maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*personal background*, *political background*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengetahuan anggaran dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan) terhadap variabel dependen pengawasan keuangan daerah sebesar 98,3% sedangkan sisanya sebesar 1,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.2.3.2. Uji Hipotesis (Uji t)

1. Pengujian koefisien regresi variabel *personal background*

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 2,796 (t hitung > t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan *personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

2. Pengujian koefisien regresi variabel *political background*

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat

dari output olah data adalah 2,249 (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan *political background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

3. Pengujian koefisien regresi variabel akuntabilitas

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 1,934 (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan akuntabilitas berpengaruh positif namun signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

4. Pengujian koefisien regresi variabel transparansi

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 2,150 (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Pengujian koefisien regresi variabel partisipasi

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 0,272 (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan partisipasi berpengaruh positif namun signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

6. Pengujian koefisien regresi variabel komitmen organisasi

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar = 2,04523. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 3,001 (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

7. Pengujian koefisien regresi variabel pengetahuan anggaran
Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar $= 2,04523$. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah $2,140$ (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
8. Pengujian koefisien regresi variabel pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan
Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $N = 38$ diperoleh t tabel sebesar $= 2,04523$. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah $0,581$ (t hitung $>$ t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan berpengaruh positif namun signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

4.2.3.3 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah:

1. Merumuskan Hipotesis
 $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat)
 $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat)
2. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan $0,05$ ($\alpha = 5\%$)
3. Menentukan F hitung
Berdasarkan output olah data diperoleh F hitung sebesar $206,931$
4. Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ maka diperoleh F tabel untuk N = 38 sebesar 2,28 karena F hitung > dari F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau ada pengaruh signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Sehingga berdasarkan uji F diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara *personal background*, *political background*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengetahuan anggaran dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan secara bersama-sama terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini telah berhasil membuktikan tentang pengaruh *personal background*, *political background*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pengetahuan anggaran dan pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh *personal background* terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa *personal background* berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini masih sejalan dengan hasil penelitian Dewi (2011) yang menyatakan *personal background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. *Personal background* merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD periode 2009-2014 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan

pengalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki *personal background* yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

4.3.2. Pengaruh *political background* terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa *political background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini juga masih sejalan dengan Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan Dewi (2011) yang menyatakan *political background* berpengaruh namun tidak signifikan terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

4.3.3. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Utomo (2011) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah hubungan argensi antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik atau warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas

merupakan salah satu alat kontrol yang muncul sebagai konsekuensi logis antara pemerintah daerah dan DPRD (Rohman, 2009).

4.3.4. Pengaruh transparansi terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Utomo (2011) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi merupakan salah satu pilar dalam menuju *good governance*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi dan mudahnya mengakses informasi yang dibutuhkan, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi yang dibangun pemerintah harus berdasarkan atas informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat maupun investor yang dimana informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007).

4.3.5. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Utomo (2011) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam era otonomi ini, mengawasi kebijakan keuangan yang dijalankan pemerintah merupakan sebuah bentuk apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menilai dan mengukur sejauh mana faedah yang didapat serta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam mensejahterakannya. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah akan berarti akan sukses pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak

semua mau berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada penyusunan anggaran (Andriani dalam basri, 2008).

4.3.6. Pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Utomo (2011) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Praminta dalam Andriyani, 2010). Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan.

4.3.7. Pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2011) dan Utomo (2011) menyatakan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Yudoyono (2000) dalam Dewi (2011) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai

kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam peran anggota DPRD terhadap anggaran maka pengetahuan dasar tentang anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah/ APBD. Sehingga sudah seharusnya setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang luas tentang anggaran daerah tersebut, sehingga dengan seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD tersebut dalam melakukan salah satu tugasnya, yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah.

4.3.8. Pengaruh pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.17 maka dapat dikatakan bahwa peraturan, prosedur, kebijakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2011) yang menyatakan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan

fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak.